

UNI EROPA DAN DEMOKRATISASI DI KAWASAN BALKAN BARAT

Alfredha Shinta Putri¹ dan Ali Muhammad²

Abstract

This article explores the role of the European Union in promoting democratisation of the countries in the Western Balkan, i.e, the former Yugoslavian states of Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, and Serbia. After the end of the Cold War and the dissolution of Yugoslavia, these emerging countries underwent political transition toward democracy and aspire to join the EU. As international actors, the EU support the transition into a free-market economic system and strengthen democratic institutions in the region using various economic and political instruments. This study uses secondary data, such as, books, journals, articles, and relevant internet sites.

Keywords: *West Balkan, European Union, free market, democratization, international actor/external factor.*

Pendahuluan

Artikel ini menganalisis tentang peran Uni Eropa dalam upaya mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. *Balkans Peninsula* (Semenanjung Balkan) adalah sebuah istilah untuk menyebut kawasan Eropa di bagian Tenggara. Istilah Balkan Barat merujuk kepada sub-kawasan Eropa Tenggara bagian barat dan negara-negara yang termasuk di kawasan ini adalah Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, dan Serbia (negara-negara *ex-Yugoslavia*) plus Albania. Selama masa Perang Dingin, Uni Soviet memiliki pengaruh dominan di kawasan ini. Peran Uni Soviet sangat eksklusif di Albania, Bulgaria, dan Rumania.

Demokrasi di kawasan Balkan Barat baru diawali dengan keruntuhan Uni Soviet dan bubarnya Yugoslavia. Negara-negara baru pecahan eks-Yugoslavia merasa bahwa sistem komunis telah gagal dan tidak membawa kesejahteraan dan manfaat bagi mereka. Masyarakat di kawasan Balkan Barat mulai memiliki kesadaran akan pentingnya kebebasan individual dan demokrasi. Akan tetapi sebagai negara yang baru lahir pasca bubarnya Yugoslavia, mereka tentu belum memiliki sistem politik demokrasi dan

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: alfredha.shintaa@yahoo.com

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: alimuhammad@umy.ac.id

pemerintahan yang kuat. Bahkan, negara-negara *ex-Yugoslavia* memiliki sistem perpolitikan yang masih kacau yang diperparah dengan ketegangan antaretnis, terutama di Bosnia-Herzegovina.

Artikel ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki peran yang besar dan penting di kawasan Balkan Barat dalam upaya mendorong demokrasi. Negara-negara ini juga tertarik untuk menjadi negara anggota Uni Eropa dianggap bisa mendorong kemakmuran, pertumbuhan ekonomi, dan demokratis. Bagi Uni Eropa, demokrasi merupakan elemen inti dari identitas politik Eropa dan merupakan karakteristik esensial bagi negara-negara yang berkeinginan menjadi anggota Uni Eropa.

Sampai saat ini, negara-negara di kawasan Balkan Barat khususnya Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia telah menjadi *candidate countries* untuk masuk ke Uni Eropa. Sedangkan Kosovo dan Bosnia-Herzegovina, baru berstatus menjadi *potential candidate countries* untuk menjadi anggota Uni Eropa (www.europa.eu, diakses 29 Oktober 2016). Yang telah lebih dahulu berhasil menjadi negara anggota Uni Eropa adalah Slovenia (2014) dan Kroasia (2013). Uni Eropa sendiri juga memiliki kepentingan di kawasan Balkan Barat yaitu *EU Enlargement* (Perluasan Keanggotaan). Hal ini sesuai kebijakan Uni Eropa yang tertuang dalam pasal 49 *Treaty of European Union*. Berkembangnya arus demokratisasi di Balkan Barat tidak hanya berasal dari keinginan negara-negara di Balkan Barat, tetapi karena dukugan internasional, yaitu Uni Eropa.

Pembahasan

Transisi Menuju Demokrasi

Yugoslavia awalnya adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 6 republik yaitu Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, dan Montenegro. Perpecahan tragis terjadi setelah bubarnya perang dingin. Setelah perang di Bosnia mereda, dimulailah penataan politik, ekonomi di negara-negara tersebut. Sebagai negara yang hidup dalam politik otoriter yang cukup lama, tantangan yang dihadapi cukup berat dan kompleks.

Pertama, problem korupsi. Korupsi adalah menjadi hambatan yang paling besar di kawasan Balkan Barat dalam membangun sebuah negara yang kuat yang berideologi demokrasi. Dapat dikatakan bahwa korupsi menjadi "*business culture*" di kawasan

Balkan Barat. Tentu saja, budaya korupsi yang ada di kawasan Balkan Barat menjadi penghambat untuk bertransisi menjadi negara yang demokratis.

Kedua, masalah lemahnya penghormatan terhadap Hak Minoritas. Balkan Barat adalah sebuah kawasan yang memiliki banyak etnis. Lemahnya penghormatan terhadap hak minoritas menimbulkan terjadinya perang sipil di kawasan Balkan Barat. Perdamaian dan stabilitas politik di kawasan Balkan Barat sangat bergantung dengan bagaimana negara tersebut men-*treatment* hak-hak minoritas (Akgun, 2001: 1). Tentu dengan banyaknya macam etnis menimbulkan berbagai macam agenda politik dari masing-masing etnis, karena mereka saling mengedepankan “*ethnic nationalism*” bukan mengedepankan “*civic nationalism*”.

Ketiga, kapasitas administrasi publik yang lemah. Administrasi atau yang bisa disebut dengan birokrasi di kawasan Balkan Barat berjalan dengan lamban, berbelit-belit, dan tidak efektif serta tidak efisien. Perkembangan teknologi dalam menopang keefektifan administrasi publik disana tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini juga disebabkan oleh SDM yang tidak berkualitas. Sehingga membuat sebuah kultur administrasi publik yang lemah di kawasan Balkan Barat.

Keempat, tingkat sosial-ekonomi yang rendah. Di kawasan Balkan Barat, tingkat perekonomian memang masih lemah. Misalnya, tingkat pengangguran yang tinggi. Sektor swasta di kawasan Balkan Barat juga tidak bisa berkembang. Dengan adanya hal tersebut maka, tingkat kemiskinan dan standar hidup di kawasan Balkan Barat sangat rendah. Selain hal di atas, dari segi sosial terjadi masifnya *brain drain*. Orang-orang pintar dan berilmu tinggi lebih tertarik untuk pergi bekerja ke luar negeri. Tentunya hal ini membuat SDM, pendidikan, inovasi penelitian dan perkembangan teknologi di kawasan Balkan Barat menjadi rendah.

Kelima, adanya kejahatan yang terorganisir. Skope kejahatan yang terorganisir yang terdapat di kawasan Balkan Barat adalah *trafficking drugs; trafficking human beings; smuggling drugs, cigarettes, and weapons*. Balkan Barat, sering disebut dengan *Balkan Route*. Kawasan Balkan Barat dijadikan transit dan *storage* dari *drugs* yang akan dikirim ke negara di Eropa. Maka hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan narkotika di kawasan Balkan Barat.

Keenam, tekanan terhadap kebebasan pers. Masalah yang dihadapi oleh media massa di kawasan Balkan Barat adalah seperti tekanan politik dan ekonomi pada media,

kriminalisasi hukum terhadap kesalahan jurnalistik, kejahatan terhadap jurnalistik, dan kepemilikan media. Para pemimpin negara di kawasan Balkan Barat berusaha untuk menekan media agar memberitakan sesuatu yang baik untuk disiarkan kepada masyarakat.

Kebijakan Uni Eropa

Uni Eropa berusaha membantu kawasan Balkan Barat dalam mendorong demokratisasikan di negara-negara ini. Bila suatu negara ingin bergabung dengan Uni Eropa, negara tersebut harus bisa memenuhi syarat *Copenhagen Criteria*. Intinya, negara-negara tersebut harus (1) mampu menciptakan stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, penegakan hukum, HAM, dan menghormati hak-hak minoritas; (2) mampu menciptakan sistem ekonomi pasar-bebas; (3) melaksanakan kewajiban sebagai negara anggota. Untuk itu, Uni Eropa mendorong agar negara-negara tersebut bisa melakukan reformasi menuju ekonomi pasar bebas dan system politik yang demokratis dengan penciptaan good governance.

Mendorong Ekonomi Pasar-Bebas

Dalam masa transisi dari sistem komunis menuju demokrasi, ada beberapa karakteristik buruk dalam ekonomi yang melekat di kawasan Balkan Barat. Ciri-ciri tersebut adalah (1) defisit eksternal yang tidak berkelanjutan, (2) level tingkat pengangguran yang sangat tinggi, (3) defisit fiskal yang besar dan tidak berkelanjutan, (4) pertumbuhan ekonomi yang rendah, (5) de-industrialisasi yang sangat cepat, (6) kredibilitas yang rendah dalam sektor bank dan sistem finansial secara umum, (7) privatisasi yang lambat dan tidak efisien, dan (8) lemahnya peraturan dan institusi ekonomi (Vladimir, 1999: ii).

Untuk mendorong reformasi sistem ekonomi dari sistem sosialis menjadi sistem ekonomi pasar-bebas, Uni Eropa mendorong liberalisasi ekonomi dengan pembentukan asosiasi perdagangan bebas kawasan Balkan Barat yang diberi nama *CEFTA Agreement* 2006. *CEFTA Agreement* ini adalah pilar penting dari *Regional Cooperation* di dalam kerangka SAP, dimana negara-negara kandidat yang ingin masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa khususnya di kawasan Balkan Barat, harus *fully implemented* CEFTA

Agreement ini. Sehingga dalam hal ini, negara-negara di kawasan Balkan Barat tidak dapat menolak *issues* dan *framework* yang terdapat di dalam kerangka ini.

CEFTA *Agreement* adalah sebuah asosiasi regional perdagangan bebas di kawasan Balkan Barat dan Eropa Tengah, yang diharapkan mampu menghidupkan dan mengembangkan ekonomi regional. Kerangka ini juga dijadikan sebagai *trade facilitation*, *elimination of non-tariff barriers*, dan sebagai sebuah aturan dalam bidang investasi, pengadaan publik, perlindungan terhadap *property rights*, dan kompetisi ekonomi (RCC, 2013: 16). CEFTA *Agreement* 2006 adalah sebuah rekomendasi dari Uni Eropa bagi negara-negara kandidat Uni Eropa dalam membangun sistem ekonomi pasar-bebas di negaranya (Mostetschnig, 2011: 1). Didirikannya CEFTA diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi pasar-bebas di kawasan ini dan sebagai wadah untuk “berlatih” melakukan sistem ekonomi pasar-bebas agar negara tersebut bisa masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa.

Dalam konteks ini, Uni Eropa memperkenalkan *Stabilization and Association Agreement* (SAA). SAA adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan memberikan fasilitas dalam menuju keanggotaan Uni Eropa (lihat table 1). Ada 10 isi mengenai *agreement* ini yaitu (1) *General Principles*; (2) *Political Dialogue*; (3) *Regional Cooperation*; (4) *Free Movement of Goods*; (5) *Movement of Workers, Establishment, Supply of Services, Movement of Capital*; (6) *Approximation of Laws, Law Enforcement, and Competition Rules*; (7) *Justice, Freedom, and Security*; (8) *Cooperation Policies*; (9) *Financial Cooperation*; (10) *Institutional, General, and Final Provisions*.

Sebagai calon pelamar anggota, Uni Eropa juga menggunakan *Pre-Accession Instrument* (IPA) di kawasan Balkan. IPA adalah sebagai bentuk dari bantuan keuangan dan bantuan teknis di kawasan Balkan Barat (Troncota, 2013: 80). Uni Eropa memberikan *economic support package* yang memiliki efek besar dalam demokratisasi dalam hal mereformasi institusi. Bantuan keuangan IPA ini dilakukan dalam dua kali periode, yaitu IPA I dari tahun 2007-2013 dan IPA II dari tahun 2014-2020. Bantuan keuangan pada periode 1 yaitu IPA I, Uni Eropa telah menghabiskan dana sebesar 11.5 milyar Euro untuk kawasan Balkan Barat. Sedangkan di dalam IPA II, sampai saat ini Uni Eropa telah menghabiskan dana sebesar 11.7 milyar Euro untuk kawasan Balkan

Barat. Target dari IPA II sendiri berusaha untuk meng-*cover* seluruh sektor demokrasi dan pemerintahan, penegakan hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam memberikan

Tabel 1. Penandatanganan SAA negara-negara Balkan Barat dengan Uni Eropa

	CROATIA	SERBIA	BAH	MONTENEGRO*	MACEDONIA (FYROM)	ALBANIA	Kosovo (UN 1244)
SAA NEGOTIATIONS STARTED	2000	June 2007	Nov. 2005	Sept 2006	2000	Jan. 2003	-
SAA SIGNED	Sept. 2001	April 2008	June 2008	Oct 2007	April 2001	June 2006	-
INTERIM AGREEMENT IN FORCE		Feb. 2010	July 2008	Jan 2008	June 2001	Dec 2006	-
SAA IN FORCE	Feb. 2005	ratification started in June 2010	so far ratified by 25/27 MS	May 2010	April 2004	April 2009	-
DATE OF MEMBERSHIP APPLICATION	Feb. 2003	Dec. 2009	-	Dec. 2008	March 2004	April 2009	-
CANDIDATE STATUS	June 2004	March 2012	-	2011	Dec. 2005	-	-
ACCESSION NEGOTIATIONS STARTED	Oct. 2005	-	-	June 2012	-	-	-
ACCESSION NEGOTIATIONS CONCLUDED	June 2011						

Sumber: Mostetschnig, A. M, 2011, *CEFTA and The European Single Market: an appropriate preparatory exercise?* Poland: Department of European Interdisciplinary Studies-College of Europe Natolin Campus, hlm 21.

bantuan keuangan tersebut, Uni Eropa melakukan *monitoring* dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan oleh *Joint Monitoring Committees*, yang kemudian Komisi Eropa mengeluarkan *Annual Report on Pre-Accession Assistance* untuk mem-*publish* budget yang diimplementasikan per-tahunnya. Evaluasi mengenai program tersebut dinilai berdasarkan indikator yang terdapat di dalam *Strategy Papers and the Programmes*.

Sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai IPA, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *CARDS Programme (Community Assistance for Reconstruction Development and Stabilization)* untuk negara-negara di kawasan Balkan Barat. Kebijakan *CARDS* ini dibuat pada tahun 2000-2006. Uni Eropa memiliki budget sebesar 4.65 milyar Euro untuk membantu dalam sektor (1) *justice and home affairs*,

(2) *administrative capacity building*, (3) *economic and social development*, (4) *democratic stabilization*, (5) *environment and natural resources*.

Mendorong *Good Governance*

Uni Eropa juga melakukan dorongan agar terciptanya suatu *good governance* di Balkan Barat melalui kebijakannya untuk dalam beberapa bidang yang strategis dan penting. *Pertama*, pemberantasan korupsi. Dalam melawan korupsi, secara keseluruhan Uni Eropa meluncurkan sebuah program yang dinamakan *Strengthening the Prosecutor's Network* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama diantara para jaksa di kawasan Balkan Barat dan mendukung *joint investigations* dalam kasus kejahatan internasional (European Commission, 2015: 2).

Kedua, mendorong terciptanya *Good Governance* dan *Rule of Law*. Mengkondisikan Balkan Barat untuk fokus kedalam peningkatan *good governance* dan *rule of law*. Pemerintahan harus berusaha menegakkan hukum dengan adil. Uni Eropa juga berusaha untuk mewujudkan transparansi di dalam pemerintahan. Di Kroasia, EU membentuk *Bureau for the Suppression of Corruption and Organised Crime* (USKOK). Di Kosovo. Uni Eropa membentuk EULEX (*European Union Rule of Law Mission to Kosovo*). Di Albania juga dapat dilihat mengenai program yang didukung oleh Uni Eropa dalam penegakan hukum di Laut Adriatik bernama *Support to Blue Border Management*. Di Macedonia terdapat *digital radio communication* yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi bagi pihak kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, meningkatkan kapasitas administrasi publik dan penguatan *civil society*. Secara umum Uni Eropa melakukan beberapa hal dalam mendorong kapasitas administrasi publik di kawasan Balkan Barat. Hal-hal tersebut adalah (1) *Technical Assistance* (TACSO) untuk inisiatif peningkatan kapasitas. (2) *People 2 People Programme* (P2P), sebuah program untuk datang ke insititusi-institusi Uni Eropa yang tujuannya untuk bertukar pengalaman, *transferring know-how*, dan *good practice*. (3) *Partnership Actions* yang bertujuan untuk memfasilitasi transfer ilmu dan realisasi *innovative cross-national project* antara CSOs dan dan Uni Eropa.

Di dalam upaya meningkatkan profesionalitas *civil service*, Uni Eropa membangun *Regional School of Public Administration* (RESPA) untuk kawasan Balkan Barat. RESPA's *office* terdapat di Danilovgrad Montenegro (European Commission,

2015: 2). Hal ini bertujuan untuk membangun kapasitas administrasi publik yang akuntabel, efektif, dan profesional.

Keempat, meningkatkan tingkat perekonomian. Misalnya, di kota Bar dan Boka-Bay Montenegro dan di kota Dubrovnik Neretva Kroasia, terjadi peningkatan hasil produksi minyak zaitun dimana ini menjadikan hasil produksi lebih kompetitif. Hal ini membuat kesempatan ekonomi dan kesempatan bekerja menjadi lebih luas. *Project* ini diimplementasikan oleh enam *local partners*. Hal ini juga mampu meningkatkan sektor *agrotourism* di kawasan ini. Promosi dan *marketing* yang dilakukan berfokus kepada *markets for nature* dan produk lokal asli.

Kelima, meningkatkan kualitas SDM dan sosial. Dalam meningkatkan kualitas SDM, Uni Eropa mengadakan program yaitu peningkatan kewirausahaan yang terdapat di Kosovo. Di Kosovo terdapat sebuah program yaitu *The Enterprise Growth Programme and Business Advisory* dimana di dalam program ini para wirausahawan baik yang kecil maupun besar dilatih untuk memimpin perusahaannya sendiri agar memiliki keahlian khusus di dalam manajemen industri. Sedangkan di dalam peningkatan di bidang sosial, Uni Eropa menyediakan alternatif yang lebih baik bagi *refugee camps* pasca konflik Kosovo.

Penguatan Lembaga Demokrasi

Peran dan dorongan Uni Eropa dalam membantu upaya demokratisasi di kawasan Balkan Barat di dalam bidang politik. Uni Eropa berperan untuk mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat dalam beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar bebas; menguatkan reformasi politik dan ekonomi; stabilitas politik; mendukung meningkatnya kerja pemerintahan dan institusi; melindungi HAM; *refugee returns*; melawan korupsi dan kejahatan terorganisir; serta menyediakan bantuan finansial dan teknis dalam melakukan perdagangan dengan negara-negara Eropa Barat (Troncota, 2013: 70).

Kroasia: Pemerintahan Kroasia telah menyelenggarakan pemilihan umum anggota parlemen sebanyak 9 kali yaitu di tahun 1990, 1992, 1995, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015, dan 2016. Sedangkan untuk pemilihan umum presiden, Kroasia telah menyelenggarakan sebanyak 6 kali yaitu di tahun 1992, 1997, 2000, 2005, 2009-2010, dan 2014-2015. Beberapa partai politik yang berhaluan demokrasi yang muncul di

Kroasia contohnya adalah (1) *Croasian Right's Party*, (2) *Social Democratic Party* (SDP), (3) *Croatian Peasant Party*, dan (4) *Croatian Democratic Assembly of Slavonia and Baranja*.

Albania: Albania menyelenggarakan pemilu setiap empat tahun sekali. Terdapat 7 *parliamentary elections* dan 6 *local elections*. Ada beberapa partai politik yang muncul di Albania yaitu *The Albanian Democratic Party* (ADP) yang muncul di tahun 1991, *Republican Party of Albania* yang muncul di tahun 1991, *Christian Democratic Party of Albania* yang muncul di tahun 1991, *Human Rights Union Party* yang muncul di tahun 1992, dan *Party of Justice Integration and Unity* yang muncul di tahun 2011 (Ioannis, 2013: 3)

Bosnia-Herzegovina: Di Bosnia-Herzegovina, telah melakukan pemilu sebanyak 6 kali pemilihan presiden di tahun 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, dan 2014; serta 7 kali pemilihan anggota parlemen. Pemilu di Bosnia-Herzegovina, dilakukan setiap empat tahun sekali.

Beberapa partai politik yang berhaluan demokrasi di Bosnia-Herzegovina adalah (1) *The Social Democratic Party of Bosnia-Herzegovina* (SDP BiH), (2) *The Alliance of Independent Social Democrats* (SNSD), dan (3) *The Bosniak SDA (Party of Democratic Action)*, (4) *Croatian Democratic Union of Bosnia and Herzegovina* (HDZ BiH), (5) *Party for Bosnia and Herzegovina* (SBiH), (6) *Croatian Party of Rights of Bosnia and Herzegovina* (HSP BiH), (7) *Party of Justice and Trust* (SPP).

Kosovo: Kosovo telah menyelenggarakan pemilihan umum presiden sebanyak 3 kali yaitu di tahun 2008, 2011, dan 2016. Sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota parlemen, telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu di tahun 2001, 2004, 2007, 2010, dan 2014. Selain itu, dalam menunjukkan perkembangan demokrasi di Kosovo, telah muncul beberapa partai politik. Partai politik yang terkategori *major party* (*Democratic Party of Kosovo*, *Democratic League of Kosovo*, dan *Alliance for the Future of Kosovo*), partai politik yang terkategori *minor party* (*Democratic Alternative of Kosovo*, *Albanian Christian Democratic Party of Kosovo*, *Democratic League of Dardania*, *Green Party of Kosovo*, dan *Liberal Party of Kosovo*), serta partai politik yang terkategori *minority party* (*Bosniak Party of Democratic Action of Kosovo*, *Kosovo Turkish Union*, *New Democratic Initiative of Kosovo*, *Union of Independent Social Democrats of Kosovo and Metohija*, dll).

Macedonia: Macedonia telah melakukan pemilu sebanyak 5 kali pemilihan presiden yaitu di tahun 1994, 1999, 2004, 2009, dan 2014; 9 kali pemilihan anggota parlemen yaitu di tahun 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2008, 2011, 2014, dan 2016; dan 6 kali pemilu lokal yaitu 1990, 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, serta yang akan datang di tahun 2017.

Partai politik yang berhaluan demokrasi yang muncul di Macedonia adalah (1) VMRO-DPMNE (*International Macedonian Revolutionary Organisation-Democratic Party of Macedonian National Unity*), (2) *The Party for Democratic Prosperity* (PDP), (3) *The Democratic Party of Albanians* (DPA), dan (4) *The Democratic Union of Integration* (DUI). Tantangan dan *problem* di Macedonia dalam penyelenggaraan pemilu saat ini adalah dalam *voters list*, kampanye, dan pendanaan.

Montenegro: Montenegro telah melakukan pemilu sebanyak 10 kali pemilihan anggota parlemen yaitu di tahun 1990, 1992, 1996, 1998, 2001, 2002, 2006, 2009, 2012, dan 2016; 7 kali pemilihan presiden yaitu di tahun 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2008, dan 2013; serta 13 *municipal elections* yaitu di tahun 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, dan 2016. Banyak partai politik yang berhaluan demokrasi yang bermunculan di Montenegro. Contoh beberapa partai politik tersebut adalah (1) *The Movement for Changes* (PzP), muncul di tahun 2006. (2) *The New Serb Democracy* (NOVA), muncul di tahun 2009. (3) *The Democratic Front* (DF), muncul di tahun 2012. (4) *The Positive Montenegro*, muncul di tahun 2012.

Serbia: Sejak tahun 1990, Serbia telah melakukan 11 kali pemilihan anggota parlemen yaitu di tahun 1990, 1992, 1993, 1997, 2000, 2003, 2007, 2008, 2012, 2014, dan 2016; serta 8 kali *presidential elections* yaitu di tahun 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2004, 2008, 2012, dan yang akan datang di tahun 2017. Partai politik yang berhaluan demokrasi mulai bermunculan di Serbia, contohnya (1) *Democratic Party of Serbia*, muncul di tahun 1992. (2) *The United Regions of Serbia* (URS), muncul di tahun 2004. (3) *The Democratic Party* (DS), muncul di tahun 2004. (5) *Liberal Democratic Party* (LDP), muncul di tahun 2005. (6) *Serbian Progressive Party* dan (7) *Christian Democratic Party*. Setelah mendapat dukungan dari Uni Eropa, secara keseluruhan perkembangan demokrasi di Balkan Barat mengalami perbaikan

Tabel 2. Indeks Demokrasi di kawasan Balkan Barat pada 2011

	Democratic Rights Index (DRI)	Rule of Law Index (RLI)	Effective Democracy Index (EDI)
Albania	66.66	0.197	13.13
Bosnia-Herzegovina	58.33	0.328	19.13
Croatia	83.33	0.891	74.25
FYR Macedonia	25.00	0.084	2.10
Kosovo	66.66	0.592	39.46
Montenegro	66.66	0.576	38.40
Serbia	75.00	0.384	28.80

Source: Rosa Balfour and Corina Stratulat: The democratic transformation of the Balkans. EPC ISSUE PAPER NO.66 NOVEMBER 2011

Dalam hal ini sangat tidak mungkin melihat upaya demokratisasi dan reformasi di kawasan Balkan Barat tanpa pengaruh dan perhatian Uni Eropa di kawasan tersebut. Uni Eropa sebagai *external support* dalam proses demokratisasi dapat dilihat sebagai fenomena berkembang yang sangat *sophisticated* dan efisien. Uni Eropa berusaha untuk mengeksport stabilitas, demokrasi, dan perkembangan ekonomi (Vladimir, 1999: 39).

Kesimpulan

Negara-negara di kawasan Balkan Barat (Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Kroasia, Macedonia, Montenegro, Serbia) telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya peran dan dorongan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Uni Eropa memiliki peran yang sangat signifikan dan penting di kawasan Balkan Barat dalam upayanya menjadi negara demokrasi. Adanya peran Uni Eropa dalam upaya mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat ada di tahun 1999.

Uni Eropa mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat dengan berbagai instrumennya seperti, SAP (*Stabilization and Association Process*). SAP (*Stabilization and Association Process*) ini menjadi sebuah peran Uni Eropa dalam mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. SAP (*Stabilization and Association Process*) sendiri sebenarnya memiliki empat pilar di dalamnya, yaitu (1) hubungan bilateral *trade*, (2) bantuan keuangan yaitu IPA (*Instrument Pre-Accession*), (3) *regional cooperation* yaitu CEFTA (*Central European Free Trade Area*), dan (4) SAA (*Stabilization and Association Agreement*). Inti dari pilar-pilar tersebut berisi dorongan dan bantuan Uni

Eropa dalam menciptakan sistem ekonomi pasar-bebas dan sistem demokrasi di kawasan Balkan Barat.

Peran Uni Eropa dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi pasar-bebas di kawasan Balkan Barat adalah dengan mendukung *regional cooperation* yaitu CEFTA (*Central European Free Trade Area*) di kawasan Balkan Barat. Tujuan utama dengan masuknya negara-negara di kawasan Balkan Barat ke dalam keanggotaan CEFTA (*Central European Free Trade Area*) adalah untuk melatih negara-negara tersebut dalam beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar-bebas.

Uni Eropa juga mendorong dan memperkuat sistem demokrasi dalam bidang politik di kawasan Balkan Barat. Uni Eropa berperan untuk mendorong penguatan reformasi politik dan ekonomi; stabilitas politik; mendukung meningkatnya kerja pemerintahan dan institusi; melindungi HAM; melawan korupsi dan penguatan good governance. Tidak mungkin melihat upaya demokratisasi dan reformasi di kawasan Balkan Barat bisa berhasil tanpa dukungan Uni Eropa di kawasan tersebut. Bila upaya berhasil, harapan mereka bergabung dengan Uni Eropa akan semakin terbuka.

Daftar Pustaka

- Akgün, D. B, June - July 2001, Democratisation and Minority Rights In The Post-Communist Balkan Barat States, *Journal of International Affairs, Volume VI - Number 2*.
- Barbara Geddes, 2009, "What Causes Democratization?" in C. B. Stokes, *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, London: Oxford University Press.
- Camila Martins O da Silva Nogueira, 2009, The Influence of International Factors in The Process of Democratization, *Brazilian Political Science Review, University of Sao Paulo Brazil*.
- Commission, E, 2015, *Pamflet Instrument for Pre-Accession Assistance: An Investment in Public Administration Reform* . Europe: European Union.
- Commission, E, 2015, *Pamflet Instrument for Pre-Accession Assistance: An Investment in Public Rule of Law*. Europe: European Union.
- Council, R. C, 2013, *South East Europe: Jobs and Prosperity in European Perspective*, Europe: European Union.
- Ioannis Armakolas, e, 2013, *Issue 4 Albanian Elections Observatory Brief*, Greece: Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

- Fidel Aksoy, 2012, *Dissertation: Significance of External F/Actors In The Democratization Process: Case of Turkey, The European Union, and The Kurdish Problem*, Berlin: Department of Political and Social Sciences of Freie Universität Berlin.
- Glenn, J. K, 1999, International Actors and Democratization : US Assistance to New Political Parties in the Czech Republic and Slovakia, *EUI Working Paper SPS No. 99/7*.
- J.F. Brown, 1989, “Conservatism and Nationalism in the Western Balkans: Albania, Bulgaria, and Rumania” in *Central and Eastern Europe : The Opening Curtain?*, USA : Westview Press.
- Khasan Ashari, 2015, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Nuansa.
- Lise Rakner, A. R, 2007, Democratisation’s Third Wave and the Challenges of Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned, *Research project (RP-05-GG) of the Advisory Board for Irish Aid*.
- Mostetschnig, A. M, 2011, *CEFTA and The European Single Market: an appropriate preparatory exercise?* Poland: Department of European Interdisciplinary Studies-College of Europe Natolin Campus.
- Panji Noor Hamzah, 2015, Skripsi: *Bergabungnya Kroasia menjadi Anggota Uni Eropa*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Parliament, E, 2015, *The Western Balkans and EU Enlargement : Lesson Learned, Ways Forward, and Prospects Ahea*, Europe: Directorate-General for External Policies.
- Landman T. dan Foweraker, J. (1997), *Citizenship Rights and Social Movement*, Oxford, Oxford University Press.
- Troncota, I. G, 2013, EU’s “Laboratory” in the Western Balkans : Experimenting Europeanization without Democratization-The Case of Bosnia and Herzegovina, *Revista Española de Ciencia Política*.
- Vladimir Gligorov, M. K, 1999, *Working Papers : Balkan Barat Reconstruction and European Integration*, Vienna: The wiiw Balkan Barat Observatory.